

Problematika Opsi Pembayaran Kembali Pinjaman *Extended Fund Facilities* - IMF:

Suatu Analisis Ekono-Politik tentang Sebab Akibat dan Skenario Solusinya

Endang Sih Prapti

The author of article below declares that the main problem in Indonesia economy is not only exit strategy of IMF, but also because of EFF-IMF will end on December 31, 2003., and MPR decided to stop it based on Tap MPR No. VI year 2002. In this respect, it needs to think way how to repay debt from EFF-IMF. The following criteria that Indonesia still needs the trust of international market, Indonesia should grow self confident, and Indonesia can be an expectation in national and integrity of Indonesia. According to writer that Indonesia should consider to choose option cash payment between 5,4 - 8,4 billion US. Dollars to propose toward reforming IMF.

Tulisan ini sengaja memilih judul yang panjang, tidak sekedar "exit strategy", karena istilah yang disederhanakan itu ternyata mengaburkan persoalan yang sebenarnya. Duduk persoalannya adalah karena pinjaman EFF-IMF akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2003, dan MPR memutuskan untuk tidak melanjutkan (Tap MPR No. VI tahun 2002), maka perlu mulai dipikirkan cara pembayaran kembali pinjaman EFF-IMF, dan selanjutnya memikirkan cara *survive* perekonomian Indonesia tanpa EFF-IMF. Jadi, meskipun judul di atas panjang, tetapi itulah duduk persoalan yang sebenarnya.

Penjelasan ini perlu dilakukan, karena kesalahpahaman masyarakat sudah masuk kategori kebablasan. Ada yang menduga bahwa artinya adalah Indonesia keluar dari keanggotaan IMF, jadi persis seperti di jaman "kemarahan Soekarno", menguman-

dangkan "go to hell with your aid" dan "keluar dari PBB" nya yang sangat terkenal itu. Lebih serunya, Prof. Anwar Nasution pun, mestinya tanpa disadari, ikut-ikutan memperluas dimensi kebingungan masyarakat. Anwar mengkaitkan "strategi eksit" dengan wawasan kebangsaan, tetapi terlalu sepihak. Anwar secara tidak langsung "memberi predikat" kepada mereka yang tidak setuju dengan strategi PPM (*post program monitoring*) pilihan pemerintah dan BI sebagai ber "nasionalisme sempit"¹. (Kalau ingin seimbang, seharusnya Anwar juga memberi predikat kepada mereka yang pro PPM sebagai ber - "kapitalisme malu-malu").

Oleh karenanya, untuk menganalisis fenomena "eksit IMF" penulis mengajak

¹. Kompas tanggal 9 Agustus 2003, halaman 13

pembaca me-*retrieve* dulu pengetahuan kita tentang IMF. Mengapa di dunia ini ada lembaga yang bernama IMF? Perlukah Indonesia menjadi anggota IMF? Apakah IMF itu "untuk" Indonesia atautkah Indonesia yang "untuk" IMF. Mengapa Indonesia harus memerlukan EFF sehingga terjebak dalam *vicious circle* bernama LOI (*Letter of Intent*) IMF? Apakah untuk "hanya sekedar menjadi anggota biasa" dari IMF (dengan kuota penuh, hak suara penuh) akan terus merupakan kemustahilan bagi Indonesia? Apakah posisi keanggotaan Indonesia di IMF merupakan ajang kepentingan ekonomi atautkah politik, nasional atautkah internasional?

Argumentasi Pro dan Kontra

Argumentasi pro dan argumentasi kontra, diawali dengan pro-kontra terhadap penerimaan pinjaman *Extended Fund Facilities* (EFF) – IMF, dan selanjutnya berayun menjadi pro-kontra pilihan opsi cara pembayaran pinjaman EFF-IMF.

Krisis ekonomi Juli 1997 ternyata mengakibatkan Indonesia kesulitan likuiditas internasional. Keadaan ini menyebabkan Indonesia memerlukan pinjaman dari IMF, padahal posisi kuota Indonesia di IMF sudah minimal. Kondisi inilah yang menyebabkan Indonesia masuk ke dalam skenario penerimaan pinjaman *Extended Fund Facilities* (EFF) – IMF, "jebakan" yang bersyaratkan LOI.

Argumentasi pro dan kontra penerimaan pinjaman *Extended Fund Facilities* (EFF) – IMF telah menjadi ajang polemik sejak kedatangan Camdessus, pimpinan IMF, ke Indonesia untuk menyaksikan penandatanganan LOI (*Letter of Intent*) oleh Suharto. Dengan penandatanganan tersebut Indonesia akan menerima bantuan dari pinjaman dari IMF untuk membantu

perekonomian Indonesia keluar dari dampak krisis ekonomi yang berawal pada Juli 1997. Pinjaman ini disebut pinjaman *Extended Fund Facilities* (EFF) – IMF atau disingkat Program IMF. Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus mematuhi serangkaian pengaturan dari IMF yang dituangkan dalam LOI.

Potret acara penandatanganan itu sangat fenomenal. Tidak sedikit yang menganalogikannya dengan "penyerahan kemerdekaan" ekonomi Indonesia ke tangan orang asing. Dari saat tersebut sampai dengan tahun 2002, bangsa Indonesia menyaksikan "pengaturan" asing dalam tata kehidupan bernegara Indonesia, yang parahnya tidak hanya dalam permasalahan ekonomi (contoh: divestasi BCA dan Indosat), tetapi akhirnya merambah juga sampai kepada area politik Indonesia oleh negara-negara yang tergabung dalam kelompok kreditor IMF (contoh: untuk menangani permasalahan domestik, seperti GAM, Indonesia tidak mampu mensterilkan diri dari campurtangan internasional).

Polemik seputar EFF-IMF berlanjut ketika Tap MPR No. VI/MPR/2002 menetapkan bahwa Indonesia harus mengakhiri EFF-IMF pada saat program berakhir pada 31 Desember 2003, dan mulai menentukan strategi eksitnya. Adu argumentasi tentang pilihan strategi eksit mana yang terbaik bagi Indonesia ini berakhir setelah Pemerintah dalam Sidang Kabinet 28 Juli 2003 memutuskan menetapkan *PPM* (*post program monitoring*) sebagai pilihan strategi eksit EFF-IMF.

IMF dan Negara Anggota Miskin

Studi terbaik tentang IMF adalah jika dilakukan terhadap efek buruk dari campurtangan IMF pada negara-negara yang "secara paksa harus menerima nasihat

IMF". Argumentasi kontra EFF- IMF akan mempertahankan pendapatnya bahwa IMF telah menjadi penghalang terhadap upaya negara-negara miskin untuk memiliki kendali atas perekonomiannya sendiri, dan menjadikan upaya memandirikan perekonomian sendiri menjadi suatu keputusan.

Sejak pendiriannya di akhir periode PD II, pada Konferensi Bretton Woods di New Jersey tahun 1944, IMF memang telah menjadi alat pilihan untuk menerapkan disiplin finansial imperialisme kepada negara-negara miskin dunia, menggunakan "bendera" multilateralisme dan bantuan teknis. Status hubungan antara negara anggota miskin pemerlu bantuan dengan IMF dapat dijadikan indikator yang akurat tentang bagaimana nasib aspirasi kemandirian dari negara tersebut.

Dalam sejarahnya, IMF berhasil menempatkan diri sebagai penasihat re-organisasi ekonomi negara-negara (miskin) anggotanya, baik yang pemerintahannya berasal dari *coup* militer, ataupun yang kampanye presidensialnya menggunakan strategi anti IMF, sampai kepada yang agak kekiri-kirian.

Apa itu IMF?, lembaga yang sangat berpengaruh tetapi *publicity-shy* ini. Bagaimana IMF dapat memainkan pengaruhnya dalam politik dan kebijakan banyak negara-negara melalui pinjamannya? IMF adalah satu "pemerintahan supranasional" yang paling berpengaruh saat ini. Sumber dana yang berada dalam penguasaannya, dan kekuatan yang ditimbulkan oleh sumber dana tersebut, memberikan IMF suatu otoritas untuk mencampuri urusan dalam negeri negara anggota, yang bahkan PBB hanya mampu memimpikannya.

Kekuatan IMF yang luar biasa ini tidak hanya melekat pada staf ekonom yang dimiliki oleh IMF, atau bahkan Dewan Gubernur IMF yang ditunjuk oleh anggota yang berjumlah 184 negara. IMF juga tidak hanya bertumpu pada kepemilikannya atas dana yang luar biasa besarnya (pada tahun 1974 saja telah berjumlah sekitar 29 milyar USD) yang berasal dari "pot" kuota negara-negara anggota, ditambah dengan SDR (*special drawing rights*), yaitu mata uang ciptaan IMF. Tetapi, "kekuatan utama IMF terletak pada peranannya sebagai *Credit Agency*; artinya, semua sumber kredit besar di dunia kapitalis maju, baik swasta, pemerintah, ataupun lembaga multilateral seperti Bank Dunia akan menolak meminjamkan uangnya kepada negara-negara yang tidak bersedia menerima "nasehat" IMF. IMF adalah penerima mandat otoritas penyaluran kredit dari pemerintah dan pasar modal dari seluruh dunia kapitalis. Oleh karenanya, IMF harus dilihat sebagai *keystone* dari suatu sistem total".

Campurtangan IMF di negara miskin selalu diawali oleh krisis devisa (*forex crisis*) yang terjadi di negara miskin tersebut (seperti yang terjadi di Indonesia mulai Juli 1997). Ada semacam aturan umum, bahwa negara miskin identik dengan kelangkaan devisa, dimana penyebab utamanya selalu "konsumsi melebihi produksi", di samping faktor politis yang sering mendorong timbulnya tekanan eksternal dalam bentuk *Lenin's Dictum* (*the most effective way to destroy a society is to destroy its currency*). Selain itu krisis devisa juga dipicu oleh pencucian uang yang diikuti oleh demam spekulasi, defisit neraca pembayaran dan neraca anggaran yang persisten, ketimpangan posisi ekonomi politik dan *bargaining power*, individual vs kartel atau konsorsium.

Kaitan Indonesia dengan IMF

Meskipun memiliki SDA dan SDM yang cukup untuk membuat Indonesia menjadi salah satu negara terkaya di dunia, namun Indonesia adalah salah satu negara termiskin dalam hal kesejahteraan penduduknya. Struktur ekonomi yang dibangun oleh kolonialisme Belanda dan karakter eksplorasi dalam hubungan ekonomi internasional membuat Indonesia pada usia mudanya menjadi negara industri terbelakang yang tergantung berat pada ekspor bahan mentah. Kegagalan membangun ekonomi Indonesia diatributkan oleh pers Barat sebagai kebijakan ekonomi yang buruk dalam era demokrasi terpimpin (1959-1965). Tuduhan ini ada benarnya tetapi harus dilihat secara perspektif. Selama dekade pertama, Indonesia dibebani utang kepada Negeri Belanda. Kewajiban yang secara paksa harus diterima sebagai harga dari kemerdekaan; dan pada saat yang sama, bisnis besar berorientasi ekspor masih dikuasai Belanda walaupun utang tersebut direpudiasi oleh Indonesia pada tahun 1956, sedangkan perusahaan Belanda dinasionalisasi tahun 1958, tetapi Indonesia tetap rapuh terhadap kondisi ekonomi dunia yang tidak mampu dikontrolnya. Soekarno gagal mengkritisi situasi ekonomi yang terjadi. Cara yang dipilih adalah membiarkan pengeluaran pemerintah membesar tanpa batas menyebabkan terjadinya inflasi dahsyat pada pertengahan dekade 1960-an. Soekarno mengupayakan pinjaman dari dua sisi, kapitalis dan komunis, yang kelak menjadi beban penggantinya.

Di tahun 1950-an Indonesia (dan India serta Yugoslavia) menjadi tumpuan harapan dapat menjadi pemimpin Dunia Ketiga, dimana pembangunannya dapat menghindarkan diri baik dari kejahatan eksploitasi kapitalisme maupun kerja berat dan serba kekurangan yang pahit dari sosialisme.

Sekarang impian itu sudah mati, dan semua bangsa negara miskin semakin tenggelam dalam ketergantungan, dibanding pada saat kemerdekaan politik diraih. Sungguh suatu cerita terbunuhnya impian kemandirian dari negara miskin.

Pada 17 Agustus 1965 Soekarno mengumumkan mundur dari IMF dan Bank Dunia dan medeklarasikan Tahun Berdikari, dimana valas dikonservasikan, menyelenggarakan kemandirian politik, impor diturunkan sampai ke tingkatan minimum, harapan ditumpukan pada PMDN dan produksi substitusi impor, dan hanya menerima PMA yang tidak dicurigai mencampuri urusan ekonomi Indonesia. Hasil yang semestinya bersifat jangka panjang dari kebijakan semacam ini tidak sempat direalisasikan, karena pada bulan Maret 1966 kekuasaan beralih ke Soeharto.

Soeharto melakukan yang sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh Soekarno. April 1966, pemerintahan Soeharto mengem-balikan perusahaan asing yang dina-sionalisasi kembali pada pemilik lamanya. Februari 1967 Indonesia kembali menjadi anggota IMF, dan aras bukti kepatuhannya, Barat menghadahi dengan kredit ad hoc sebesar 174 juta USD, dan penjadwalan kembali utang jatuh tempo sebesar 536 juta USD selama lima tahun sampai dengan mulai diangsur 1971-1978. IGGI dibentuk tahun 1967 yang dilanjutkan oleh CGI sebagai upaya AS berbagi beban dalam membantu Indonesia.

Juli 1997 Indonesia dilanda krisis devisa, yang diatasi dengan EFF-IMF yang akan berakhir pada 31 Desember 2003. Kontroversi eksit dari EFF-IMF muncul karena EFF-IMF atau sering disebut dengan istilah bantuan Program dari IMF harus dibayar mahal, tidak hanya karena bunganya cukup signifikan, tetapi yang lebih berat lagi adalah karena Indonesia harus

membayarnya dengan kepatuhan pada LOI, yang terlalu mencampuri pengaturan ekonomi Indonesia.

IMF bukanlah tokoh buruk yang sesungguhnya, tetapi hanyalah agen dari tokoh buruk itu sendiri. Perusahaan multinasional dan pemerintahan kapitalislah "musuh" alamiah dari kemandirian dunia ketiga, yang biasanya dapat memobilisasikan sumber daya untuk menggerus upaya kemandirian tersebut. Tetapi ini juga kisah tentang kesalahan, kelemahan, dan keserakahan manusia di negara miskin, yang memberi "musuh kemandirian" suatu *fifth column* di dalam tubuh politik korbannya. Sebagaimana yang diperingatkan oleh Mao Tse Tung pada kadernya di Cina tahun 1949, yaitu bahwa "peluru berbalut gula borjuis lebih fatal menimbulkan revolusi dibanding peluru yang sesungguhnya".

Enam Opsi Pilihan : Kelemahan dan Kelebihan

Keenam opsi tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok opsi. adalah: Opsi adalah dengan kecenderungan melanjutkan EFF. Dalam kelompok ini, kelebihanannya Indonesia masih mendapat kucuran uang pinjaman dari IMF dengan konsekuensi melanjutkan kepatuhan pada LOI. Macam opsinya adalah:

1. EFF diteruskan
2. *Standby arrangements*
3. *Precautionary arrangements*

Kelompok opsi B adalah dengan kecenderungan menyelesaikan atau membayar kembali EFF. Dalam kelompok ini, kelemahannya Indonesia tidak mendapat kucuran uang pinjaman dari IMF. Derajat keterkaitan dengan – keterlepasan Indonesia dari LOI, tergantung opsi yang dipilih. Macam opsinya adalah:

1. PPM (*Post Program Monitoring*): Dengan pilihan PPM, artinya 5,4 milyar USD dari seluruh pinjaman EFF sebesar 8,4 milyar USD pinjaman EFF diangsur pembayarannya, sehingga pada tahun 2007 sisa pinjaman masih sebesar 3 milyar USD, atau sebesar kuota Indonesia di IMF. Arti lebih jauhnya adalah sebelum tahun 2007 Indonesia masih akan dimonitor oleh IMF, dan pada tahun 2007 akan menjadi anggota IMF dengan kuota nol dan hak suara nol.
2. Utang sebesar 5,4 milyar USD dari seluruh pinjaman EFF sebesar 8,4 milyar USD dibayar tunai. Sisa pinjaman masih sebesar 3 milyar USD, atau sebesar kuota Indonesia di IMF. Arti lebih jauhnya adalah Indonesia lepas dari *monitoring* oleh IMF, dan menjadi anggota IMF dengan kuota nol dan hak suara nol.
3. Seluruh pinjaman EFF sebesar 8,4 milyar USD dibayar tunai, maka Indonesia akan menjadi anggota IMF dengan kuota penuh dan hak suara penuh.

Menetapkan Pilihan Cara Pembayaran Kembali

Ekonom yang berspesialisasi pada ekonomi moneter, termasuk staff IMF (dan staff BI), biasanya membangun suatu kemistikan di sekeliling subyek pemikirannya, sehingga seringkali menggelisahkan masyarakat, bahkan juga para ekonom yang lain. Mereka menganggap dirinya sebagai teknisi terlatih yang mampu menetapkan dengan tepat

2. Cheryl Payer, *The Debt Trap*, 1974, *The Politics of International Economic Relations*, 2nd edition, St. Martin Press, New York. Hlm, xiii)

berapa kurs tukar valas atau berapa jumlah kreasi uang, menggunakan formula yang rumit, yang seringkali hanya dapat dimengerti oleh mereka sendiri. Mereka meremehkan arti penting politis dari tindakannya, atau bahkan mereka mungkin telah mengkondisikan dirinya untuk percaya bahwa rumusannya adalah yang terbaik, sehingga menganggap tidak ada alternatif nyata yang mampu menandingi rumusan hasil manipulasinya. Contohnya adalah bunga 60% sebagai respons atas Krisis Moneter Juli 1997; dan kucuran 50 juta USD untuk menjinakkan volatilitas kurs Rupiah pasca Bom Bali. Hanya sedikit yang peduli kepada munculnya aspek politik dari suatu issue moneter semacam itu, dan mau memberikan penjelasan kepada publik.

Evolusi politik internal dari suatu bangsa selalu secara akrab dan terstruktur berhubungan erat dengan situasi ekonomi eksternalnya. Keadaan ekonomi dari suatu negara menentukan struktur politiknya, dengan cara yang sama seperti tengkorak membangun postur tubuh manusia. Meskipun tubuh tidak bisa berkembang melenceng dari ukuran dan bentuk tengkoraknya, namun demikian, struktur tulang tidak dapat menentukan warna kulit, warna rambut, atau bentuk penampilan daging yang menempel pada tulang tersebut, seperti moral dan intelektual yang membuat tiap orang unik.

Sama juga halnya, dalam rangka melepaskan diri dari lingkaran setan kebutuhan utang dan ketergantungan. Jika kita selalu diarahkan untuk mengingkari keberadaan dari alternatif penyelesaian, maka kita akan terdesak untuk selalu mencari tahu persoalan yang sebenarnya dan solusi yang mungkin dari persoalan tersebut. Dan jika struktur dan bentuk tulangnya telah dirusak oleh kekuatan eksternal maka tidaklah aneh jika daging

dan spiritnya juga turut rusak. Hanya dengan bantuan pengertian mendalam tentang alternatif apa saja yang mungkin, pembuat kebijakan dapat mengkoreksinya tanpa harus membunuh pasien.

Tidak ada resep mujarab untuk memperoleh solusi yang mudah. Mungkin solusinya bukan pemilihan opsi strategi eksit? Apakah reformasi IMF perlu juga untuk dipertimbangkan? Masalahnya adalah menangani perekonomian Indonesia tanpa bantuan IMF dan sponsornya akan menjadi lebih kompleks. Bisa saja berakhir dengan kebahagiaan, tetapi tak bisa tanpa determinasi, pengorbanan, dan pandangan jernih terhadap berbagai alternatif solusi yang tersedia. Epistemologi ekonomi sendiri mematok ketentuan bahwa pendapat ekonom tidak lebih dari sekedar fiksi, yang agar tidak terjerembab menjadi asbun (asal bunyi), atau astul (asal tulis) dan bahkan tonni (waton muni) harus dilegalisasi. Ekonomi hanya mengakui tiga elemen legalisasi, yaitu moral, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan keluarnya Tap MPR No. VI tahun 2002, berarti pinjaman EFF-IMF harus tetap berakhir pada 31 Desember 2003. Hal ini berarti opsi-opsi dalam kelompok opsi A menjadi tidak relevan lagi. Kesempatannya tinggal memilih salah satu dari 3 (tiga) opsi dalam kelompok B.

Opsi yang paling ideal adalah membayar lunas seluruh pinjaman EFF sebesar 8,4 milyar USD, sehingga Indonesia dapat menjadi anggota IMF yang "normal", karena kuotanya penuh dan hak suaranya penuh.

Namun demikian, persoalannya tidak sekedar cadangan devisa Indonesia yang sebesar 37, 1 milyar USD akan berkurang menjadi tinggal 28,7 milyar USD, lalu apakah sisa cadangan devisa tersebut

cukup untuk melanjutkan kehidupan ekonomi Indonesia sampai kepada pemerintahan baru yang terbentuk pasca Pemilu. Andaikata cadangan devisa tersebut dapat dianggap cukup, maka anggapan itu pastilah dilandasi oleh keadaan ekono-politik yang *ceteris paribus*. Masalahnya, bagaimana jika keadaan *ceteris paribus* tidak terpenuhi? Misalnya, bagaimana jika ada "pihak asing" yang tidak menginginkan Indonesia menikmati posisi menjadi anggota IMF yang "normal", kuotanya penuh dan hak suaranya penuh? Maka dengan mudah akan ada Lenin's Dictum kedua, akan ada krisis ekonomi kedua.

Penutup

Opsi manapun yang dipilih hendaknya berlandaskan pemikiran yang nyata tentang kecukupan cadangan devisa, dan tentang kriteria: (1) harus mampu mempertahankan kepercayaan pasar internasional pada ekonomi Indonesia, sehingga Indonesia dapat tetap melanjutkan pembangunan ekonominya; (2) harus mampu membangun harga diri dan rasa percaya diri bangsa; dan (3) harus mampu menjadi tumpuan integritas NKRI.

Pilihan opsi PPM yang ditetapkan Pemerintah dalam Sidang Kabinet 28 Juli 2003, juga menyiratkan simpulan-simpulan ekono-politik Pemerintahan Indonesia, yaitu bahwa (1) rasa percaya diri Indonesia masih rendah, masih merasa belum mampu menjalankan roda perekonomian tanpa bantuan IMF, dan (2) yang terlebih penting, menyadari bahwa Indonesia harus menghadapi kenyataan posisi IMF sebagai *credit agency*, sehingga Indonesia masih harus mengambil sikap *low profile* dengan memposisikan diri sebagai pihak yang masih perlu mempertahankan kepercayaan pasar internasional pada ekonomi Indone-

sia, sehingga Indonesia dapat tetap melanjutkan pembangunan ekonominya, tanpa gangguan, tanpa *Lenin's Dictum* kedua, tanpa krisis ekonomi kedua. Harga diri dan rasa percaya diri bangsa, serta integritas NKRI harus dibangun dalam koridor pilihan ini.

Namun demikian apakah tidak mungkin untuk memberikan alternatif pilihan yang lain? Dua hal yang dapat dipertimbangkan, setelah mempertimbangkan semua dasar pertimbangan di atas adalah:

- (1). Masih dalam kelompok opsi B, tetapi memilih di antara opsi B.2 dan B3, yaitu pembayaran tunai di antara 5,4 milyar – 8,4 milyar USD, sehingga Indonesia bebas LOI dan menjadi anggota IMF yang kuotanya tidak nol yang berarti hak suaranya juga tidak nol.
- (2). Mengusulkan reformasi terhadap IMF termasuk reformasi aturan main hubungan utang bilateral dan multilateral antara IMF dengan anggota-anggotanya. ●

Daftar Pustaka

- Batra, Ravi, 1987, *The Great Depression of 1990*, New York: Simon & Schuster.
- Friedman, Milton, 1982, *Capitalism and Freedom*, Chicago: The University of Chicago.
- Hogendorn, Jan S., and Wilson B. Brown, 1979, *The New International Economics*, Massachusetts: Addison Wesley.
- Kahler, Miles, 1986, *The Politics of International Debt*, Ithaca: Cornell University Press.

Topik: Indonesia keluar dari IMF

- Kim, Kwan S., and David F. Ruccio, 1985, *Debt and Development in Latin America*, Notre Dame: University of Notre Dame Press .
- Kwik Kian Gie, *Opsi Terbaik Setelah Berakhirnya IMF*, Kompas, Senin 16 Juni 2003, hal. 15
- Lee, Susan Previant, and Peter Passel, 1979, *A New Economic View of American History*, New York: W.W. Norton Company.
- Lewis, John P, and Valeriana Kallab, *US Foreign Policy and The Third World: agenda 1983*, New York: Praeger.
- Payer, Cheryl, *The Debt Trap, 1974: The IMF and The Third World*, New York: Monthly Review Press.
- Spero, Joan Edelman, 1981, *The Politics of International Economic Relations*, 2nd edition, New York: St. Martin Press.

